

RINGKASAN

YENI ASTRIANI
NIM 207410101011

**Upaya Hukum Banding Terdakwa
Terhadap Putusan Perkara Pidana
(Analisis Perkara Nomor
179/PID.SUS/2020/PN LSK)**

Dr. Herinawati, S.H., M.Hum
Dr. Muhammad Nur, S.H., M.H

Putusan hakim dengan putusan perkara Nomor 179/PPID.SUS/2020/PN LSK tentunya mengakibatkan cederanya hukum di lembaga yudikatif atas hal dakwaan Jaksa terhadap terdakwa yaitu mengajukan tuntutan selama 5 (lima) tahun, namun dalam hal ini hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon melalui perkara Nomor 179/Pid.sus/2020/Pn Lsk memutuskan terdakwa Mustami Bin Arahman dijatuhi hukuman 8 (delapan) tahun, atas putusan tersebut dikategorikan putusan yang melampaui tuntutan dari penuntut umum atau dalam menjatuhkan putusan. Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa hakim menjatuhkan putusan didasari surat dakwaan penuntut umum. Apabila putusan hakim di luar pasal surat dakwaan penuntut umum maka hal tersebut bertentangan. Hal ini juga diperkuat Pasal 193a ayat (1) KUHAP tetapi tetap ada batas-batas yang harus dipatuhi. Misalnya, hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman lebih tinggi dari pada ancaman maksimum dalam pasal yang didakwakan.

Penelitian ini bertujuan mengetahui Untuk mengetahui Faktor apa yang menyebabkan Terdakwa mengajukan upaya hukum banding dalam perkara pidana Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Lsk dan untuk mengetahui dampak hukum dari upaya hukum banding yang dimohonkan oleh terdakwa terhadap putusan perkara pidana Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Lsk.

Metode penelitian dalam penulisan tesis ini menggunakan jenis penelitian Normatif. Penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder atau studi kepustakaan. Pengolahan data dilakukan dengan membuat sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis baik itu secara pengolahan data dan kajian hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan (1) Faktor yang menyebabkan Terdakwa mengajukan upaya hukum banding dalam perkara pidana Nomor 179/Pid.Sus/2020/PN Lsk yaitu dikarenakan putusan yang dilakukan oleh hakim melampaui tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, secara teori keadilan putusan tersebut masih jauh dari pada apa yang dicita-citakan oleh ahli hukum sehingga mencederai hak yang ada pada setiap orang yang mencari keadilan. (2) Akibat hukum dari upaya hukum banding yang dimohonkan oleh terdakwa terhadap putusan perkara pidana Nomor 179/Pid.Sus/2020/PNLsk yang sudah diperbaiki oleh Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 268/Pid/2020/PT.Bna merugikan terdakwa, hal ini menyebabkan terjadinya ketimpangan dalam putusan perkara hakim dari tingkat pertama sehingga terdakwa merasakan adanya ketimpangan dalam hal keadilan manifestasi ini kemudian muncul dalam teori kepastian hukum, dan teori keadilan yang tidak mencerminkan dari hati nurani hakim sebagai pemegang kunci hukum sebagai pilar negara.

Disarankan kepada hakim agar dalam memberikan putusan tidak melewati hukuman pidana dalam surat tuntutan penuntut umum, dikarenakan putusan hakim terdahulu dapat dijadikan yurisprudensi bagi putusan inkrah lainnya. Disarankan kepada hakim harus lebih hati-hati dalam mengambil keputusan agar putusan yang dihasilkan tidak merugikan terdakwa dan dapat memberikan manfaat serta keadilan dari apa yang dicita-citakan oleh negara hukum seperti Indonesia.

Kata Kunci : Upaya Hukum, Banding, Putusan Perkara Pidana.

ABSTRACT

YENI ASTRIANI
NIM 207410101011

*Legal Efforts to Appeal by the Defendant
Against the Decision in a Criminal Case
(Case Analysis Number
179/PID.SUS/2020/PN LSK)*

Dr. Herinawati, S.H., M.Hum
Dr. Muhammad Nur, S.H., M.H

The judge's decision using ultra petita certainly resulted in legal injury to the judiciary. Due to this, the defendant took legal action to appeal so that he could not be separated from the cumulative problems of injustice, errors, treatment and attitude of the judge who adjudicated a case. based on the results of the prosecutor's demands against the defendant, namely filing his lawsuit for 5 (five) years from the results of the defendant's actions, however in this case the Lhoksukon District Court judge through case Number 179/Pid.sus/2020/Pn Lsk decided that the defendant Mustami Bin Arahman was sentenced to 8 (eight) years, the decision is categorized as having exceeded the limits of a judge's authority or is called Ultra Vires in handing down a decision. Article 178 paragraph (3) HIR and Article 189 paragraph (3) RBg, which basically prohibits a judge from deciding a case beyond what is required (petitum) strengthens Article 193a paragraph (1) KUHAP, if the court is of the opinion that the defendant is guilty of committing a criminal act , then the court sentenced him. But there are still limits that must be obeyed. For example, the judge may not impose a sentence higher than the maximum threat in the article charged.

This research aims to find out what factors caused the defendant to file an appeal in criminal case Number 179/Pid.Sus/2020/PN Lsk and to find out the legal impact of the appeal filed by the defendant against the ultra petita decision in the criminal case Number 179/Pid.Sus/2020/PN Lsk.

The research method in writing this thesis uses normative research. Normative research is legal research that uses secondary data or literature studies.

The results of the research show (1) What factors caused the Defendant to file an appeal in criminal case Number 179/Pid.Sus/2020/PN Lsk, namely because the decision made by the judge exceeded the demands submitted by the public prosecutor, therefore This decision is detrimental to the defendant as a seeker of justice, and does not achieve just legal objectives. (2) The legal impact of the legal appeal submitted by the defendant against the ultra petita decision in criminal case Number 179/Pid.Sus/2020/PN Lsk is detrimental to the defendant, this causes inequality in the judge's case decision from the first level so that the defendant feels that there is inequality in terms of justice as a justice seeker in Indonesia.

It is recommended to judges that when giving decisions they do not exceed the limits of demands demanded by the public prosecutor, because previous judges' decisions can be used as jurisprudence for other final decisions, thereby causing injustice in achieving just law. It is recommended that judges be more careful in making decisions so that the resulting decision does not harm the defendant and can provide the benefits and justice of what is aspired to by a rule of law country like Indonesia..

Keywords : Legal Remedies, Appeals, Decisions Crime.